



BAB II

PERSPEKTIF TEORITIK

A. Kajian Kepustakaan Konseptual

1. Kajian Tentang Pengorganisasian Masyarakat

a. Pengertian Pengorganisasian Masyarakat

Istilah ‘pengorganisasian rakyat’ (*people organizing*) atau juga yang lebih dikenal dengan istilah ‘pengorganisasian masyarakat’ (*community organizing*) sebenarnya adalah suatu peristilahan yang sudah menjelaskan dirinya sendiri. Istilah ini memang mengandung pengertian yang lebih luas dari kedua akar katanya. Istilah rakyat disini tidak hanya mengacu pada suatu perkauman (*community*) yang khas dan, dalam konteks yang lebih luas, juga pada masyarakat (*society*) pada umumnya. Istilah pengorganisasian disini lebih diartikan sebagai suatu kerangka proses menyeluruh untuk memecahkan permasalahan tertentu ditengah rakyat, sehingga bisa juga diartikan sebagai suatu cara pendekatan bersengaja dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu dalam rangka memecahkan berbagai masalah mesyarakat tersebut.¹⁸

Menurut Murray G. Ross, dalam bukunya Abu Huraerah menjelaskan bahwa pengorganisasian masyarakat adalah suatu proses ketika suatu masyarakat berusaha menentukan kebutuhan-kebutuhan atau tujuan-tujuannya, mengatur atau menyusun, mengembangkan

¹⁸ Jo Hann Tan, dan Roem Topatimasang, *Mengorganisir Rakyat: Refleksi Pengalaman Pengorganisasian Rakyat di Asia Tenggara* (Jogjakarta: SEAPCP-REaD, 2003), hal 5



kepercayaan dan hasrat untuk memenuhinya, menentukan sumber-sumber (dari dalam atau dari luar masyarakat), mengambil tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pemenuhan kebutuhan-kebutuhannya, dan dalam pelaksanaan kebutuhannya, memperluas dan mengembangkan sikap-sikap dan praktik-praktik.¹⁹

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengorganisasian masyarakat adalah suatu proses penentuan dalam memecahkan suatu masalah yang terjadi ditengah kehidupan masyarakat, dan dalam proses tersebut seorang pengorganisir harus serta merta melibatkan masyarakat tersebut. Karena seorang pengorganisir masyarakat dapat dikatakan berhasil jika sang pahlawan adalah masyarakat itu sendiri dan bukannya sang pengorganisir lain yang berasal dari masyarakat tersebut.

Jika sang pengorganisir itu memang berasal dari kalangan masyarakat setempat itu sendiri. Ia akan tetap mukim dan hidup ditengah masyarakatnya, tidak lagi secara langsung melakukan peran-peran pengorganisasian apapun, tetapi memusatkan perhatian mendidik dan mengembangkan organiser-organisier baru, lapisan kedua atau ketiga, sehingga terbangun suatu mekanisme internal dikalangan rakyat disana yang melanjutkan tradisi pengorganisasian mereka.²⁰

¹⁹ Abu Huraerah, *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat: Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan* (Bandung: Humaniora, 2011), hal. 143

²⁰ Jo Hann Tan, dan Roem Topatimasang, *Mengorganisir Rakyat: Refleksi Pengalaman Pengorganisasian Rakyat di Asia Tenggara* (Jogjakarta: SEAPCP-REaD, 2003), hal. 5



b. Tujuan Pengorganisasian Masyarakat

Tujuan mengorganisir rakyat adalah menghapuskan semua ketidakadilan dan penindasan.²¹ Ketidakadilan dan penindasan dapat dilakukan oleh siapapun baik itu pemerintah ataupun orang-orang yang menganggap diri mereka berkuasa sehingga melakukan tindakan tersebut, dengan banyaknya ketidakadilan dan penindasan yang terjadi. Karena dari sekian banyaknya ketidakadilan dan penindasan yang terjadi, banyak pula orang yang hanya duduk dan menyaksikan hal tersebut, atau bahkan mereka merasa terganggu dan mengatakan ketidak setujuannya tapi kembali lagi mereka tidak mampu berbuat apa-apa. Sehingga ketidakadilan dan penindasan yang terjadi ditengah masyarakat semakin meningkat dan bertampah parah.

Dari sanalah kita dapat melihat apa yang menjadi landasan dan tujuan seorang pengorganisir dalam melakukan pengorganisasian masyarakat, apakah mereka mampu mencapainya atau tidak. Pengorganisasian masyarakat juga sama sekali tidak netral, tetapi sarat dengan pilihan-pilihan nilai, kaidah asas, keyakinan dan pemahaman tentang masyarakat dan bagaimana agar keadilan, perdamaian dan hak-hak asasi manusia ditegakkan dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat.²²

²¹ Ibid, hal. 3

²² Ibid hal. 3-4



c. Tahap-tahap Proses Pengorganisasian Masyarakat

Proses pengorganisasian masyarakat akan dapat terlihat apabila seseorang tersebut terjun langsung dan melihat masalah tersebut secara langsung, yang mana akan terlihat masalah, issu, keadaan, yang sesuai dengan konteks sosial, budaya, politik, ekonomi, dan lain-lain.²³ Satu kunci keberhasilan proses pengorganisasian masyarakat adalah memfasilitasi mereka sampai akhirnya mereka dapat memiliki suatu pandangan dan pemahaman bersama mengenai keadaan dan masalah yang mereka hadapi.

Proses pengorganisasian masyarakat terdiri dari serangkaian tahapan yang berkaitan satu sama lain sebagai suatu kesatuan yang terpadu, yakni :

1) Memulai pendekatan

Pendekatan dalam proses-proses pengorganisasian sering terjadi dalam kehidupan masyarakat, hanya saja tergantung pada keadaan, baik itu keadaan yang biasa atau keadaan luar biasa. Jadi, seorang pengorganisir dituntut untuk menemukann metodologii atau pendekatan-pendekatan khusus dalam menangani masalah-masalah khas yang masyarakat hadapi.

Bahkan jika seorang pengorganisir merasa sudah menemukan dan telah merumuskan cara-cara pendekatan yang dianggap tepat, tidak berarti cara-cara tersebut dengan sendirinya dapat dilaksanakan

²³ Ibid, hal. 6



sepenuhnya dengan mulus. Karena, kenyataannya akan selalu ada dimana ara tersebut tidak tepat, atau bahkan sulit untuk dilaksanakan. Namun seorang pengorganisir yang tanggap harus siap menghadapi berbagai keadaan-keadaan yang berbeda.

Sedangkan hal terpenting dalam melakukan pendekatan adalah bagaimana membuat masyarakat merasa kita datang kepada mereka dengan cara yang wajar dan alamiah, bukan sesuatu yang sudah direkayasa dengan cara yang sangat kaku, atau bahkan terkesan mengada-ada.²⁴

2) Memfasilitasi proses

Salah satu fungsi pokok dari pengorganisir, baik yang memang berasal dari masyarakat setempat ataupun berasal dari luar, adalah memfasilitasi rakyat yang diorganisirnya. Memfasilitasi dalam pengertian ini hanya berupa proses-proses pelatihan atau hanya sekedar pertemuan. Seorang fasilitator adalah seorang yang memahami peran-peran yang dijalankannya serta memiliki keterampilan teknis untuk menjalankannya, yakni keterampilan memfasilitasi proses yang membantu, memperlancar, mempermudah masyarakat agar pada akhirnya mampu untuk melakukan sendiri seperti yang dijalankan oleh seorang pengorganisir.

Maka dari itu, seorang fasilitator sebelum melakukan sebuah tindakan paling tidak harus memiliki penghubung yang tepat dengan

²⁴ Ibid, hal. 19



masyarakat, pengetahuan yang cukup luas, pandangan yang kerakyatan, dan keterampilan teknis mengorganisir serta melakukan proses-proses fasilitasi.²⁵

3) Merancang strategi

Proses-proses pengorganisasian masyarakat dianggap sebagai unsur paling penting dalam semua gerakan-gerakan perubahan sosial.ada beberapa unsure pokok uraian sebagai langkah-langkah perumusan-perumusan strategi ke arah perubahan social :

a) Menganalisis keadaan (pada arah mikro maupun makro)

Langkah ini harus dilakukan bersama dengan masyarakat yang merasakan dampak dari semua perkembangan, sehingga semua pengamatan dan pandangan terhadap perkembangan dan arah kecenderungannya memang benar-benar menggambarkan keadaan masyarakat itu sendiri.

b) Merumuskan kebutuhan dan keinginan masyarakat

Setelah melakukan tahap awal, maka masyarakat mulai diajak merumuskan apa saja kebutuhan dan keinginan mereka, baik yang bersifat jangka pendek, menengah, maupun panjang. Kemudian ajak mereka menetapkan daftar kebutuhan yang harus didahulukan.

²⁵ Ibid, hal. 43

c) Menilai sumber daya dan kemampuan masyarakat

Barulah kemudian ajak masyarakat melihat apa saja sumber daya dan kemampuan yang mereka miliki serta tekad dan kesiapan dalam melaksanakan upaya-upaya untuk mencapai kebutuhan.

d) Menilai kekuatan dan kelemahan masyarakat sendiri dan lawannya

Langkah berikutnya ajak masyarakat menganalisis kekuatan dan kelemahan mereka, bagaimana caranya memperkecil kelemahan dan memperbesar kekuatan yang mereka miliki. Setelah itu perlu pula menganalisis kelemahan dan kekuatan berbagai pihak yang terkait dengan perkembangan keadaan dan masalah yang dihadapi, termasuk pihak-pihak lawan yang menentang yang menghalangi pencapaian kebutuhan.

e) Merumuskan bentuk tindakan dan upaya yang tepat dan kreatif

Yang terakhir adalah mengajak masyarakat merumuskan bentuk tindakan yang dapat mereka lakukan serta cara untuk melakukannya secara tepat guna dan kreatif. Hal yang harus difahami oleh masyarakat adalah bahwa ada banyak kemungkinan tindakan dan cara yang dapat ditempuh, tidak hanya terbatas pada apa yang mereka ketahui dan pernah mereka lakukan selama ini.²⁶

4) Mengerahkan tindakan

Mengerahkan aksi adalah bentuk kegiatan sederhana dan keseharian masyarakat, yang mana melibatkan sekelompok kecil

²⁶ Ibid, hal. 63-66



masyarakat tetapi dilakukan dengan sengaja untuk mencapai tujuan bersama. Terkadang suatu pengeraha aksi bersama bahkan hanya sekedar untuk membangkitkan kembali semangat masyarakat yang mulai mengendur.

Mempersiapkan suatu aksi adalah salah satu bagian dari proses pengorganisasian yang paling kompleks, karena banyak factor yang dipertimbangkan, banyak tahapan-tahapan yang harus dilalui, dan banyak pula pihak yang dilibatkan. Salah satu langkah yang paling penting sebelum aksi terjadi adalah mempersiapkan masyarakat sendiri dalam melakukan aksi tersebut. Karena masyarakat harus dilibatkan penuh sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, tindak lanjut suatu aksi, dan yang terpenting adalah masyarakatlah yang menentukan isu apa yang dijadikan tema pokok suatu aksi, serta tujuan yang ingin mereka capai.

Sedangkan peran seorang pengorganisir dalam proses mengerahkan aksi hanya sebagai fasilitator yang membantu mereka bekerja lebih sistematis, termasuk menyediakan informasi penting yang belum diketahui oleh masyarakat. Bahkan jika perlu melatih beberapa keterampilan teknis yang dibutuhkan untuk membuat aksi tersebut berjalan lebih lancar dan efektif.²⁷

²⁷ Ibid, hal. 75



5) Menata organisasi dan keberlangsungannya

Mengorganisir masyarakat berarti membangun dan mengembangkan satu organisasi yang didirikan, dikelola dan dikendalikan oleh masyarakat sendiri. Sedangkan pengertian membangun organisasi masyarakat adalah membangun dan mengembangkan suatu struktur dan mekanisme yang menjadikan masyarakat sebagai pelaku utama semua kegiatan organisasi yang ada, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi dan tindaklanjutnya.

Satu hal yang harus diyakini para pengorganisir masyarakat adalah bahwa masyarakat manapun sebenarnya sudah memiliki organisasi mereka sendiri, mulai dari yang paling sederhana dan terpencil sudah mengenal dan mempraktekkan kehidupan berorganisasi.²⁸

6) Membangun sistem pendukung

Masyarakat termasuk sang perorganisir harus memiliki pemahaman yang jelas mengenai berbagai jenis peran dan taraf kemampuan yang mereka butuhkan dari berbagai pihak luar. Karena berbagai jenis peran dan taraf kemampuan tidak mungkin dimiliki dan dilaksanakan seluruhnya oleh suatu organisasi masyarakat secara sendirian.

²⁸ Ibid, hal. 91



Berbagai jenis peran dan taraf kemampuan yang biasanya dibutuhkan sebagai sistem pendukung dari luar dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- a) Penyediaan berbagai bahan-bahan dan media kreatif untuk pendidikan dan pelatihan.
- b) Pengembangan kemampuan organisasi rakyat itu sendiri untuk merancang dengan menyelenggarakan proses-proses pendidikan dan pelatihan.
- c) Penelitian dan kajian, terutama dalam rangka penyediaan informasi berbagai kebijakan dan perkembangan ditingkat nasional dan internasional, mengenai masalah yang diperjuangkan masyarakat.
- d) Penyediaan prasarana dan sarana kerja organisasi.²⁹

Mengorganisir masyarakat berarti juga membangun dan mengembangkan satu organisasi yang didirikan, dikelola, dan dikendalikan oleh rakyat setempat sendiri. Dan membangun organisasi masyarakat dalam pengertian ini adalah juga membangun dan mengembangkan suatu struktur dan mekanisme yang menjadikan mereka, pada akhirnya sebagai pelaku utama semua kegiatan organisasi, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi dan tindak lanjut. Bahkan sejak awal sebenarnya struktur dan mekanisme itu harus dibentuk oleh rakyat setempat sendiri. Karena Proses-proses

²⁹ Ibid, hal. 107-118



pengorganisasian masyarakat mutlak harus mengupayakan dan menjadikan rakyat itu sendiri pada akhirnya sebagai pelaku utama.³⁰

d. Tugas dan Peran Pengorganisir Masyarakat

Tugas seorang pengorganisir masyarakat adalah memfasilitasi agar seluruh proses penuh pertentangan tersebut tetap dapat ditonton secara jelas dan lengkap oleh masyarakat, yang atas dasar penyaksian mereka sendiri, akhirnya mampu melakukan tindakan-tindakan bersama untuk menghadapinya sesuai dengan keadaan dan kemampuan masyarakat.³¹ Dalam artian lain tugas dari pengorganisir masyarakat hanyalah memfasilitasi masyarakat, tapi dalam hal tindakan masyarakat sendirilah yang akan bertindak sesuai kemampuan mereka dan juga berdasarkan masalah-masalah yang terjadi pada lingkungan mereka.

Peran dan tanggung jawab yang dilakokan oleh mereka yang terlibat dalam proses-proses pengorganisasian harus dirumuskan se jelas mungkin:

- 1) Berperan sebagai orang lapangan, yang melakukan kerja-kerja langsung di tengah rakyat (*ground works*)
- 2) Berperan menjalankan digaris depan (*frontline*), mereka adalah para juru runding, juru bicara, yang mana berurusan dengan pemerintah atau politisi melalui lobi-lobi, dan dengan kalangan media massa untuk keperluan kampanye atau penyebaran informasi. Dan mereka adalah yang menjalankan advokasi kebijakan

³⁰ Ibid, hal. 122

³¹ Ibid, hal. 4

3) Berperan sebagai pendukung (*supporting*), dengan berbagai keterampilan khusus seperti pencari dana, penyedia bahan-bahan dan pembekalan, peneliti, dan lain-lain.³²

Satu hal yang perlu diketahui oleh seorang pengorganisir masyarakat yakni, kerja kerelawanan (*voluntarism*). Mengorganisir masyarakat, sekali lagi bukanlah lapangan pekerjaan untuk mencari nafkah. Akan tetapi pengorganisasian masyarakat dimanapun selalu menunjukkan bahwa orang terlibat didalamnya lebih karena dorongan komitmen, semacam kepuasan batin (*passion*).³³

2. Kajian Tentang Pemberdayaan

a. Pengertian Pemberdayaan

Pemberdayaan berasal dari bahasa Inggris “*empowerment*” yang secara harfiah bisa diartikan sebagai “pemberkuasaan”, dalam arti pemberian atau peningkatan kekuasaan (*power*).³⁴ Istilah pemberdayaan menurut Kartasmita adalah upaya untuk membangun daya itu sendiri dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya.³⁵ Upaya tersebut diikuti dengan memperkuat potensi yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Dalam konteks ini diperlukan langkah-langkah yang lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana yang

³² Ibid, hal. 8

³³ Ibid, hal. 99

³⁴ Abu Huraerah, *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat: Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan*(Bandung: Humaniora, 2008), 82

³⁵ Onny S. Prijono dan A. M. W. Pranarka *Pemberdayaan : konsep, kebijakan, dan implementasi*(Centre for Strategic and International Studies, 1996), 140

kondusif. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (input), serta pembukaan akses kepada berbagai peluang (*opportunities*) yang membuat masyarakat menjadi makin berdaya.³⁶

Menurut Pranarka dan Moeljarto konsep pemberdayaan pada dasarnya adalah upaya menjadikan suasana kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi semakin efektif secara strukturalis, baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat, Negara, regional, internasional, dalam bidang ekonomi, dan lain-lain. Ide yang menempatkan manusia lebih sebagai subyek dari dunianya sendiri mendasari dibakukannya konsep pemberdayaan (*empowerment*).

Dalam *oxford english dictionary*, pemberdayaan merupakan terjemahan dari kata *empowerment*, dengan kata dasar *empower* yang mengandung dua pengertian:

- 1) *to give power to* (memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas kepada pihak lain).
- 2) *to give ability to enable* (usaha untuk memberi kemampuan).

Sementara Freire menyatakan *empowerment* bukan sekedar memberikan kesempatan rakyat menggunakan sumber daya dan biaya pembangunan saja, tetapi juga upaya untuk mendorong mencari cara menciptakan kebebasan dari struktur yang *opresif*.

³⁶ Ibid, hal. 141



Menurut Edi Suharto pemberdayaan dapat diartikan sebagai tujuan dan proses. Sebagai tujuan, pemberdayaan adalah suatu keadaan yang ingin dicapai, yakni masyarakat yang memiliki kekuatan atau kekuasaan dan keberdayaan yang mengarah pada kemandirian sesuai dengan tipe-tipe kekuasaan yang disebutkan sebelumnya.

Sumodiningrat menyatakan, bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Adapun pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut 2 kelompok yang saling terkait, yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan.³⁷

Dalam pengertian lain, pemberdayaan atau pengembangan atau tepatnya pengembangan sumber daya manusia adalah upaya memperluas horizon pilihan bagi masyarakat. Ini berarti masyarakat diberdayakan untuk melihat dan memilih sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya. dengan memakai logika ini dapat dikatakan, bahwa masyarakat yang berdaya adalah yang dapat memilih dan mempunyai kesempatan untuk mengadakan pilihan-pilihan. Secara terminologis, pengembangan atau pemberdayaan masyarakat Islam berarti mentransformasikan dan melembagakan semua segi ajaran Islam dalam kehidupan keluarga (usrah), kelompok sosial (jamaah), dan masyarakat (ummah). Amrullah Ahmad menyatakan bahwa pengembangan masyarakat Islam adalah

³⁷ Gunawan Sumodiningrat, *Pembangunan Daerah Dan Pemberdayaan Masyarakat*(Jakarta: PT. Bina Rena Pariwara, 1997), hal. 55

sistem tindakan nyata yang menawarkan alternatif model pemecahan masalah ummah dalam bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam perspektif Islam.³⁸

b. Prinsip Pemberdayaan

Pelaksanaan pendekatan di atas berpijak pada pedoman dan prinsip pekerjaan sosial. Menurut beberapa penulis, seperti Solomon (1976), Rappaport (1981, 1984), Pinderhughes (1983), Swift (1984), Swift dan Levin (1987), Weick, Rapp, Sullivan dan Kisthardt (1989), terdapat beberapa prinsip pemberdayaan menurut perspektif pekerjaan sosial.

- 1) Pemberdayaan adalah proses kolaboratif, karenanya pekerja sosial dan masyarakat harus bekerjasama sebagai partner.
- 2) Proses pemberdayaan menempatkan masyarakat sebagai aktor atau subyek yang kompeten dan mampu menjangkau sumber-sumber dan kesempatan-kesempatan.
- 3) Masyarakat harus melihat dari mereka sendiri sebagai agen penting yang dapat mempengaruhi perubahan.
- 4) Kompetensi diperoleh atau dipertajam melalui pengalaman hidup, khususnya pengalaman yang memberikan perasaan mampu pada masyarakat.
- 5) Solusi-solusi, yang berasal dari situasi khusus, harus beragam dan menghargai keberagaman yang berasal dari faktor-faktor yang berada pada situasi masalah tersebut.

³⁸ Nanih Machendrawati, *Pengembangan Masyarakat Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), hal. 42



- 6) Jaringan-jaringan sosial informal merupakan sumber dukungan yang penting bagi penurunan ketegangan dan meningkatkan kompetensi serta kemampuan mengendalikan seseorang.
- 7) Masyarakat harus berpartisipasi dalam pemberdayaan mereka sendiri; tujuan, cara dan hasil harus dirumuskan oleh mereka sendiri.
- 8) Tingkat kesadaran merupakan kunci dalam pemberdayaan, karena pengetahuan dapat memobilisasi tindakan bagi perubahan.
- 9) Pemberdayaan melibatkan akses terhadap sumber-sumber dan kemampuan untuk menggunakan sumber-sumber tersebut secara efektif.
- 10) Proses pemberdayaan bersifat dinamis, sinergis, berubah terus, evolutif, permasalahan selalu memiliki beragam solusi.
- 11) Pemberdayaan dicapai melalui struktur-struktur personal dan pembangunan ekonomi secara paralel.³⁹

c. Tujuan Pemberdayaan

Tujuan pemberdayaan adalah mengembangkan partisipasi masyarakat miskin yaitu berkembangnya sikap, pengetahuan, dan keterampilan berusaha agar mampu meningkatkan kemandiriannya dan kesejahteraannya.⁴⁰

Sedangkan tujuan pemberdayaan yang lain adalah agar masyarakat itu merasa perlu dilibatkan dalam membangun, merasa berperan dalam

³⁹ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), hal. 68-69

⁴⁰ M. Nadhir, *Memberdayakan Orang Miskin Melalui Kelompok Swadaya Masyarakat* (Sidoarjo: Yapsem, 2009), hal. 1

menentukan nasibnya sendiri, dan lebih dari itu akan memiliki harapan masa depannya sendiri sesuai dengan apa yang mereka kehendaki.⁴¹

d. Model Pemberdayaan Masyarakat

1) Pendampingan secara langsung, yaitu fasilitator tinggal dilokasi kelompok atau masyarakat yang akan dikembangkan. Model ini biasa diterapkan pada tahap penumbuhan kelompok atau tahap animasi, karena pada kelompok yang sedang tumbuh memerlukan banyak bimbingan, konsultasi, dan informasi.

2) Pendampingan Berkala, yaitu fasilitator datang ke kelompok atau masyarakat pada waktu-waktu tertentu yang telah disepakati dan tinggal beberapa waktu bersama masyarakat. Model ini diterapkan pada kelompok yang sudah cukup berkembang, fasilitator bersama masyarakat melakukan evaluasi kegiatan yang sudah dilakukan, mengidentifikasi permasalahan dan mencari alternatif pemecahannya, menyusun rencana kegiatan untuk waktu yang akan datang.⁴²

e. Unsur Pemberdayaan Masyarakat

1) Pendamping

Pendamping adalah bagian dari komponen lembaga, instansi atau dunia usaha dalam proses pemberdayaan, maka pendamping berkewajiban:

⁴¹ Hari Witono, dkk, *Pemberdayaan Masyarakat Modul Para Aktivis Masyarakat* (Sidoarjo: Paramulia Press, 2006), hal. 4

⁴² M. Nadhir, *Memberdayakan Orang Miskin Melalui Kelompok Swadaya Masyarakat* (Sidoarjo: Yapsem, 2009), hal. 11-12



- a) Bertanggung jawab atas pelaksanaan seluruh kegiatan pemberdayaan.
- b) Melakukan koordinasi dengan pihak yang terkait untuk memperlancar proses penguatan masyarakat lokasi program dan sekitarnya.
- c) Menyusun konsep dan materi atau bahan pembelajaran untuk kegiatan penguatan kapasitas.⁴³

2) Kegiatan Pemberdayaan

- a) Pendampingan
- b) Usaha kesejahteraan sosial, yaitu kegiatan yang secara berkelanjutan dan mandiri melayani masyarakat miskin dengan sistem sosial yang ada lembaga sosial pengelola pembiayaan program dan operasional.⁴⁴

f. Strategi Pemberdayaan

Dalam konteks pekerjaan sosial, pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga aras atau matra pemberdayaan (*empowerment setting*) yakni:

- 1) Aras Mikro, pemberdayaan pada aras ini dilakukan terhadap klien secara individu yang mana melalui bimbingan, konseling, *stress management*, dan *crisis intervention*. Dengan tujuan untuk membimbing atau melatih klien dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya.

⁴³ Ibid, hal. 3

⁴⁴ Ibid, hal. 6-7



- 2) Aras Mezzo, pemberdayaan pada aras ini dilakukan terhadap sekelompok klien yang mana menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan, pelatihan, pengetahuan dan keterampilan merupakan strategi dalam meningkatkan kesadaran dalam memecahkan permasalahan yang dihadapinya.
- 3) Aras Makro, aras ini disebut juga sebagai strategi sistem besar karena perubahannya lebih terhadap lingkungan yang lebih luas seperti perumusan kebijakan, kampanye, aksi sosial, dan pengorganisasian masyarakat. Aras ini juga memandang klien sebagai orang yang memiliki kompetensi untuk memahami situasi-situasi mereka sendiri, dan juga untuk memilih serta menentukan strategi yang tepat untuk bertindak.⁴⁵

Dalam pemberdayaan selain mengarahkan masyarakat untuk berani menguasai diri mereka sendiri tanpa bergantung pada orang lain, tapi kita juga harus mampu untuk membangkitkan keinginan dari masyarakat secara aktif dan juga mampu untuk meneguhkan komitmen sosial terhadap *stakeholder* agar melakukan sesuatu yang menguntungkan bagi masyarakat yang biasa kita sebut dengan sebutan mobilisasi sosial.

g. Perubahan sosial

Perubahan sosial dalam pemberdayaan masyarakat pada hakekatnya merupakan suatu proses perubahan evolusioner yang

⁴⁵ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat* (Bandung: Refika Aditama, 2006), hal. 66-67



disengaja dan terarah. Unsur-unsur yang terkandung dalam suatu perubahan dirumuskan oleh Kotler sebagai “5 C”, yaitu:

- 1) *Cause* (sebab) yaitu upaya atau tujuan sosial yang dipercaya oleh pelaku perubahan dapat memberikan jawaban pada problem sosial.
- 2) *Change agency* (agen perubahan) yaitu organisasi yang misi utamanya memajukan perubahan sosial.
- 3) *Change target* (sasaran perubahan) yaitu individu atau kelompok sosial yang ditunjuk sebagai sasaran upaya perubahan.
- 4) *Channel* (saluran) yaitu media untuk menyampaikan pengaruh dan respon dari setiap pelaku perubahan ke sasaran perubahan.
- 5) *Change strategy* (strategi perubahan) yaitu teknik utama mempengaruhi yang diterapkan oleh pelaku perubahan untuk menimbulkan dampak pada sasaran perubahan.

Kotler mengemukakan bahwa upaya perubahan sosial yang terarah dalam pemberdayaan komunitas tidak terlepas kaitannya dengan masalah sosial dan aksi sosial. Tiga hal tersebut merupakan suatu rangkaian yang saling berhubungan. Adanya masalah sosial dapat menimbulkan perubahan sosial dan untuk mengarahkannya diperlukan aksi sosial.⁴⁶

3. Kajian Tentang Komunitas CIKUNG

Kalau dilihat dari arti dasarnya komunitas adalah masyarakat setempat atau suatu populasi yang menempati suatu daerah.⁴⁷ Komunitas sebagai sebuah kelompok sosial dari beberapa organism yang berbagi lingkungan,

⁴⁶ [Http://Staffsite.Gunadarama.Ac.Id/Agus-Dhl](http://Staffsite.Gunadarama.Ac.Id/Agus-Dhl), diunduh tanggal 15 Desember 2012 pukul 11.45 WIB

⁴⁷ Tim Prima Pena, *Kamus Ilmiah Populer*, hal. 258

umumnya memiliki ketertarikan dan habitat yang sama. Dalam komunitas manusia, individu-individu di dalamnya dapat memiliki maksud, kepercayaan, sumber daya, preferensi, kebutuhan, risiko dan sejumlah kondisi lain yang serupa.⁴⁸

Bell dan Newby mengatakan definisi komunitas sangat problematis, dan dari banyak definisi yang dikemukakan hanya sedikit yang memiliki kesamaan. Oleh karena itu, setiap orang yang menggunakan kata ini berkewajiban memberikan klarifikasi secukupnya mengenai arti yang dikenakan kepadanya. Adapun ciri-ciri komunitas ada 5 yaitu :

a. Skala Manusia

Komunitas melibatkan interaksi-interaksi pada suatu skala yang mudah dikendalikan dan digunakan oleh individu-individu. Jadi, skalanya terbatas pada orang yang akan saling mengenal atau dapat dengan mudah untuk saling berkenalan apabila diperlukan, dan di mana interaksi-interaksi sedemikian rupa sehingga mudah diakses oleh semua. Struktur-struktur berukuran cukup kecil sehingga orang mampu memiliki dan mengendalikannya, yang dengan itu membuka pintu bagi pemberdayaan yang jujur.

b. Identitas dan Kepemilikan

Bagi kebanyakan orang, kata komunitas akan memasukkan perasaan 'memiliki', atau perasaan diterima dan dihargai dalam lingkup kelompok tersebut. hal ini menyebabkan penggunaan istilah anggota

⁴⁸ Soenarno, arti-komunitas.html, <http://djepok.blogspot.com/2011/09>, diunduh pada tanggal 22 November 2012



komunitas; konsep keanggotaan memiliki arti memiliki, penerimaan oleh yang lain dan kesetiaan pada tujuan-tujuan kelompok.

c. Kewajiban-kewajiban

Keanggotaan dari sebuah organisasi membawa baik hak maupun tanggung jawab, dan sebuah komunitas juga menuntut kewajiban tertentu dari para anggotanya. Terdapat harapan bahwa orang akan berkontribusi kepada 'kehidupan komunitas' dengan berpartisipasi dalam paling sedikit beberapa dalam kegiatan-kegiatannya, dan bahwa mereka akan berkontribusi kepada pemeliharaan struktur komunitas. Semua kelompok membutuhkan pemeliharaan jika ingin tetap hidup, dan tanggung jawab fungsi-fungsi pemeliharaan dari suatu komunitas terletak sebagian besar pada para anggotanya oleh karena itu, menjadi seorang anggota dari sebuah komunitas seharusnya tidak menjadi pengalaman yang miris pasif, tetapi seharusnya juga melibatkan sesuatu partisipasi aktif.

d. Perbedaan

Sebuah komunitas akan memungkinkan orang berinteraksi dengan sesamanya dalam keragaman peran yang lebih besar, yang peran-peran tersebut kurang dibedakan dan bukan berdasarkan kontrak, dan yang akan mendorong interaksi-interaksi dengan yang lain sebagai 'seluruh warga' ketimbang sebagai peran atau kategori yang terbatas dan tetap. Hal ini tidak hanya penting dalam pengertian pengembangan diri, kontak antar manusia dan pertumbuhan pribadi, ia juga memungkinkan individu-individu untuk menyumbangkan berbagai bakat dan

kemampuan untuk keuntungan yang lain dan komunitas tersebut sebagai suatu keseluruhan.

e. Kebudayaan

Kebudayaan masyarakat modern diproduksi dan dikonsumsi pada tingkat massal, yang terlalu sering mengakibatkan keseragaman yang steril dan pemindahan kultur dari orang-orang biasa. Suatu komunitas memungkinkan pemberian nilai, produksi dan ekspresi dari suatu kebudayaan local atau berbasis masyarakat, yang akan mempunyai ciri-ciri unik yang berkaitan dengan komunitas yang bersangkutan, yang akan memungkinkan orang akan menjadi produser aktif dari kultur tersebut ketimbang konsumen yang pasif, dan yang akan, kemudian, mendorong baik keanekaragaman diantara komunitas maupun partisipasi yang berbasis lebar.⁴⁹

Kelima ciri tersebut jelas saling berhubungan, dan seharusnya dilihat bukan sebagai kategori-kategori yang mesti berbeda, tetapi lebih merupakan manifestasi-manifestasi yang berbeda-beda dari fenomena yang sama.

B. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Sebagai bahan pertimbangan bagi penelitian ini, penulis menari referensi hasil penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan pada fokus penelitian yang ingin diteliti. Adapun penelitian terdahulu yang dapat digunakan sebagai referensi yaitu:

⁴⁹ Jim Ife dan Frank Tesoriero *Community Development Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*, terj. Sastrawan Manullang dkk. (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008), hal. 191



Skripsi yang berjudul “Pengelolaan Sampah Sebagai Proses Pengembangan Masyarakat Berbasis Lingkungan Di Desa Janti Kecamatan Waru kabupaten Sidoarjo” karangan Rizqi Relifi Antin.

Dalam karya ilmiah di atas fokus yang dikaji adalah proses pengembangan masyarakat dalam penanganan sampah melalui kerja sama dengan pemerintah umum, dinas kebersihan dan pertamanan kota, dan swadaya masyarakat. Hasil penjualan dari pengelolaan sampah mereka masuk ke kas desa yang bisa digunakan membantu masyarakat yang membutuhkan.

Yang membedakan antara karya ilmiah di atas dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah proses pemberdayaan yang dilakukan komunitas CIKUNG, yang mana komunitas ini menerapkan penanganan sampah dengan menggunakan program Bank Sampah. Program ini melibatkan masyarakat dalam penanganannya, masyarakat memilah sampah yang bernilai ekonomias untuk di setorkan kepada komunitas CIKUNG setelah itu hasil dari sampah tersebut pengurus mencatat untuk disimpan di buku tabungan mereka.

Jadi, masyarakat juga membantu penanganan sampah dengan menjadi nasabah dalam program Bank Sampah yang dilakukan oleh komunitas CIKUNG di Desa Segorotambak Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo.

Sebagai salah satu mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel Surabaya, yang berada di Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) Fakultas Dakwah. Melalui penelitian lapangan ini juga sebagai bukti tanggung jawab dari muatan kurikulum jurusan, khususnya di jurusan



Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah yang lebih menekankan pada keseimbangan teori dan praktek.

Penulis di sini beranggapan, bahwa penelitian untuk skripsi tentang Pengorganisasian Masyarakat oleh Komunitas CIKUNG yang menekankan pada pemberdayaan lingkungan sangat relevan dengan Jurusan dan Laboratorium di Pengembangan Masyarakat Islam. Untuk kemudian bisa merumuskan ilmu dakwah yang sesuai dengan konteks penelitian ini. Memang penulis menyadari bahwa studi tentang pemberdayaan lingkungan ini lebih sesuai dikaji oleh Jurusan Kesehatan. Akan tetapi, apabila dikaji lebih mendalam lagi.

Penelitian ini lebih relevan di Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, karena bagaimanapun juga untuk memahami dan mengkaji masyarakat memang tidak akan bisa melepaskan ilmu-ilmu sosial Pengembangan Masyarakat Islam. Akan tetapi aspek pengembangan masyarakat terkait dengan aplikasi ilmu-ilmu sosial adalah ‘aksi’ yang dalam Fakultas Dakwah lebih dikenal dengan “*Dakwah bil hal*”. Yang dalam konteks ini lebih ditekankan pada Pemberdayaan Lingkungan (Studi tentang Pengorganisasian Masyarakat oleh Komunitas CIKUNG di Desa Segorotambak Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo) yang lingkungannya bisa dikategorikan kurang atau memprihatinkan.